

RCEP:

Regional Comprehensive
Economic Partnership

Perdagangan antar bangsa bukan lagi soal kerja sama untuk melengkapi kebutuhan yang tidak diproduksi oleh negeri sendiri. Namun telah bergeser menjadi persaingan, di mana upaya yang dilakukan adalah bagaimana mempertahankan dan memperdalam keterbukaan akses pasar, mendorong konektivitas/keterhubungan (dalam konteks rantai produksi global) dan penyesuaian peraturan (deregulasi). Maka tak heran ketika perundingan-perundingan WTO dianggap lambat beberapa tahun belakangan ini, perusahaan dan negara-negara industri/maju pun mengubah fokusnya pada perjanjian perdagangan bebas antar negara (bilateral) dan dalam satu kawasan seperti ASEAN (regional). Dengan harapan dapat mendorong keberlanjutan isu yang sulit diterapkan dalam konteks perdagangan multilateral seperti WTO.

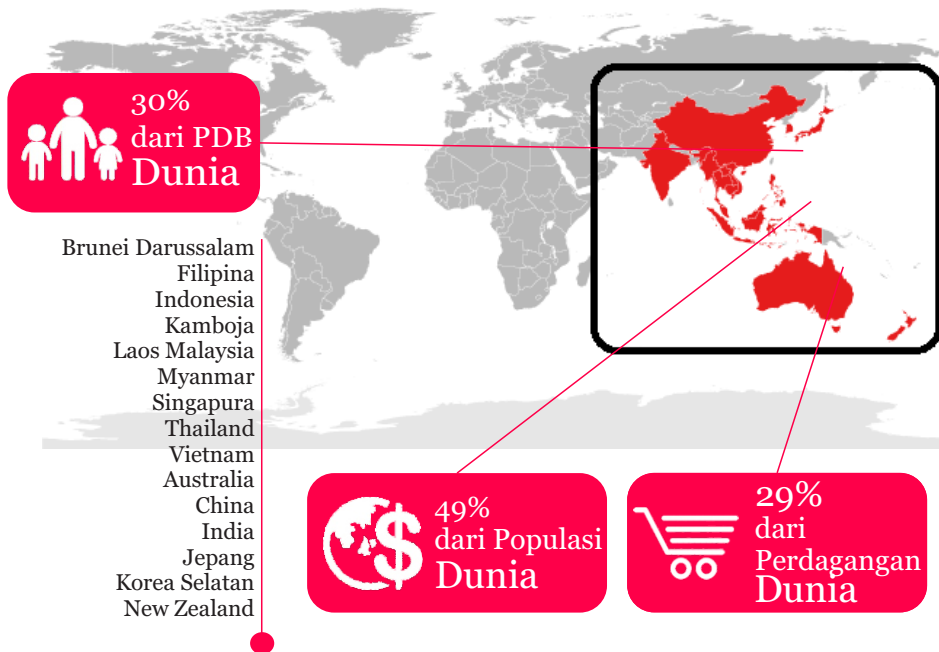
Di tengah mulai berlaku sepenuhnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia sedang mengkaji untuk bergabung dengan TPP (*Trans-Pacific Partnership*) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. RCEP pun muncul menandingi TPP (*Trans-Pacific Partnership*) sebagai *mega trading bloc*¹ yang saling bersaing untuk menguasai perdagangan di Asia Pasifik. Namun tidak seperti TPP yang wacananya sangat mengemuka di ruang publik, RCEP nampaknya tidak menjadi perhatian meskipun juga akan berdampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan perempuan. Hal yang penting diingat adalah bukan soal siapa yang akan menang dalam persaingan ini. TPP ataupun RCEP, keduanya hanya akan memperkuat kepentingan perusahaan dan negara maju atau negara industri, menghilangkan kedaulatan nasional dan merampas hak-hak rakyat termasuk hak-hak perempuan atas hidup dan sumber-sumber kehidupannya.

¹*Mega Trading Bloc* merupakan perkembangan tren perdagangan bebas yang lebih luas cakupannya, secara wilayah maupun lingkup pengaturannya.

Apa itu RCEP?

RCEP adalah satu inisiatif untuk menghubungkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 mitra ASEAN dalam perjanjian Perdagangan Bebas: Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru. Jika proses negosiasi berhasil, RCEP akan menciptakan mega-blok perdagangan terbesar dengan implikasi yang sangat besar bagi perekonomian dunia, khususnya negara-negara Asia.

Meskipun sering disebut sebagai perjanjian perdagangan, namun ruang lingkup RCEP lebih luas dari sekedar perdagangan. Sebagian besar dari isi perjanjian akan memberikan negara-negara maju dan perusahaan mereka kekuasaan untuk menyelami isu-isu selain perdagangan yang berimplikasi luas bagi banyak sektor dan masyarakat.



Timeline



Di antara Kepentingan Amerika dan Cina: Di mana Rakyat?

Asia Pasifik merupakan kawasan ekonomi yang menggiurkan bagi negara-negara industri/maju dan perusahaan-perusahaan multinasional/transnasional. Salah satu alasan utama yang digunakan pemerintahan Obama dalam mengusung Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) adalah bahwa jika Amerika tidak membuat perjanjian perdagangannya, maka Cina akan melakukannya. Artinya ada persaingan antara TPP yang dipimpin oleh Amerika tanpa melibatkan Cina dan RCEP dengan Cina didalamnya.

Padahal ada masalah yang parah di kawasan Asia Pasifik, di mana perjanjian perdagangan bebas telah menjamur dalam beberapa tahun terakhir. Hingga tahun 2015 setidaknya ada 126 perjanjian perdagangan bebas yang berlaku di Asia. Akibatnya banyak negara Asia dengan aturan perdagangan yang kompleks dan sering bertentangan serta tumpang tindih dalam perjanjian perdagangan bebas (*"noodle bowl syndrome"*).

Patut dipertanyakan, di mana kepentingan rakyat, khususnya perempuan di tengah persaingan berbagai skema perjanjian perdagangan bebas tersebut. PBB telah menyampaikan kekhawatiran akan potensi pelanggaran HAM. Pernyataan yang dikeluarkan oleh *UN Office of the High Commissioner for Human Rights* pada 2 Juni 2016 menegaskan "adanya kekhawatiran yang sangat jelas bahwa berbagai perjanjian investasi bilateral dan multilateral berpotensi memperburuk

persoalan kemiskinan, membahayakan renegotiasi utang luar negeri yang adil dan efisien, dan akan mempengaruhi hak-hak masyarakat adat, mindoritas, kelompok difabel dan kelompok masyarakat lainnya yang ada dalam situasi rentan”.

ASEAN Centrality

Sejumlah pihak melansir bahwa RCEP merupakan inisiatif ASEAN yang dipimpin oleh Indonesia dan bukan inisiatif Cina. RCEP ingin mengkonsolidasikan semua negara anggota ASEAN dengan prinsip “*ASEAN Centrality*”. Tapi pada faktanya, posisi ASEAN sebagai suatu kesatuan pun tidak jelas mengingat negara-negara anggota ASEAN pun ada di level yang berbeda-beda.



Ironisnya, walau akan berdampak luas bagi masyarakat, perundingan RCEP ini hanya dapat diakses oleh perusahaan dan kelompok bisnis tertentu, serta pejabat pemerintah dari negara-negara yang terlibat. Tidak ada teks yang tersedia secara transparan bagi masyarakat, anggota parlemen, masyarakat sipil ataupun media. Sehingga masyarakat yang berpotensi terkena dampak pun tidak tahu apa yang sebetulnya mereka hadapi. Tidak transparannya perundingan ini tentunya bukanlah tindakan yang demokratis dan tidak sesuai dengan semangat *People-Centered ASEAN*.

Sedikit informasi mengenai RCEP hanyalah di dapat dari dokumen yang berhasil diretas. Dari dokumen tersebut, nyata bahwa RCEP akan mengancam akses masyarakat terhadap obat dan memperkuat perusahaan melalui mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) yang akan sangat menghancurkan negara berkembang.



Ketentuan tentang kekayaan intelektual (IP) berpotensi membatasi akses obat-obatan generik bagi jutaan orang di seluruh Asia, termasuk ODHA, penderita TB dan kanker. Perusahaan farmasi besar mendapatkan keuntungan dan kekuatan untuk memperpanjang monopoli paten dan memegang kendali atas harga obat.



Mekanisme ISDS menjadikan pemerintah nasional rentan untuk digugat oleh perusahaan atas upayanya melindungi hak ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, kesehatan dan penggunaan tanah yang dianggap mengancam investasi. ISDS juga kerap digunakan oleh perusahaan untuk menghindari dari pajak. Penggelapan pajak perusahaan saat ini menjadi persoalan serius di seluruh dunia.



Penurunan tarif impor akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Padahal penerimaan perpajakan telah berkontribusi lebih dari 70% dari total pendapatan domestik.



Menghilangkan kedaulatan petani atas benih. Karena Jepang dan Korea akan mendorong negara anggota RCEP untuk bergabung UPOV 1991 sebagai standar umum yang memaksakan negara untuk menerapkan perlindungan varietas tanaman. Dan ada usulan lainnya untuk mengkriminalisasi penyimpanan benih tanpa otorisasi dari pemegang hak paten.



Negara akan berlomba untuk mengeliminasi hak-hak buruh dan standar perlindungan lingkungan dan perlindungan rakyat, demi mengundang investor, sehingga perusahaan akan lebih besar pilihan dan peluangnya untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan sumber daya di antara negara-negara anggota.



Jika disepakati, produksi yang dilakukan oleh negara-negara anggota akan berorientasi ekspor dan ekonomi bergantung pada impor. Hal ini akan menggagalkan setiap peluang pembangunan industri dalam negeri.

Berdampak Buruk bagi Masyarakat, Bencana bagi Perempuan

Berbagai ancaman yang menyertai negosiasi RCEP akan dirasakan dan dihadapi berbeda oleh perempuan. Hal ini karena peran gender yang dilekatkan oleh masyarakat kepada perempuan, serta kontrol atas seksualitas perempuan.



Ancaman kriminalisasi terhadap pemulia benih secara langsung akan mengancam perempuan petani. Mengingat perempuan seringkali dipercaya dan memiliki peran sebagai pelestari dan pemelihara benih karena ketekunannya.²

²Pada tahun 2010 seorang petani pemulia benih jagung dilaporkan ke polisi oleh PT BISI (perusahaan benih anak perusahaan Charoen Phoekphand) dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembudidayaan tanamaan tanpa izin. Negara dan korporasi menggunakan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman serta UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Atas nama perlindungan



Orientasi ekspor dalam produksi pertanian akan menggusur perempuan petani yang karakteristiknya subsisten³. Hal ini karena pola produksi skala besar untuk ekspor akan membutuhkan lahan pertanian yang besar dan mendorong adanya mekanisasi pertanian. Terlebih budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat membatasi akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya pertanian.



Saat layanan kesehatan menjadi mahal akibat monopoli obat, perempuan akan lebih menderita. Hal ini karena peran perawatan dalam keluarga umumnya masih dilekatkan pada perempuan. RCEP akan menjamin hak istimewa yang tak terbatas dan hak paten atas berbagai obat penting maupun pelayanan medis yang sebagian besar telah dikuasai oleh perusahaan multinasional dan transnasional.

RCEP akan mendorong kompetisi tenaga kerja tapi tanpa upaya perlindungan hak-hak tenaga kerja. Ekonomi yang berorientasi ekspor akan berupaya meminimalisir ongkos produksi, termasuk upah bagi tenaga kerja. Dalam situasi ini, perempuan yang cenderung mengalami tekanan penurunan upah, standar layak kerja maupun perlindungan hak-hak lainnya, termasuk hak reproduksi perempuan.

terhadap varietas unggul milik korporasi petani kecil pun ditangkap oleh negara.

³ Pola produksi subsisten artinya pola produksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan perempuan dan keluarganya, bukan skala besar yang ditujukan untuk ekspor.

Apa yang Bisa Dilakukan?

RCEP mengancam kedaulatan negara, kepentingan nasional, perlindungan atas lingkungan hidup, layanan publik, serta hak-hak rakyat termasuk hak perempuan. Sehingga penting bagi masyarakat untuk membangun kekuatan bersama dan mendorong tanggung jawab negara dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat.



Sebarkan Informasi

Suarakan perlawanan terhadap perjanjian perdagangan bebas, termasuk RCEP, dengan terus menyebarkan informasi dan kajian kritis serta berbagai potensi dampak perdagangan bebas. Utamanya kepada kelompok masyarakat yang akan terkena dampak.



Terlibat Kampanye

Galang dukungan publik untuk menolak perdagangan bebas yang tidak adil melalui beragam bentuk kampanye kreatif.



Aksi Massa

Mengorganisir massa untuk melakukan aksi mendesak Pemerintah agar melindungi kepentingan rakyat Indonesia menghadapi perdagangan bebas.



www.solidaritasperempuan.org



Solidaritas Perempuan



@Soliper_SP



Solidaritas Perempuan



Solidaritas Perempuan
Women's Solidarity for Human Rights

Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.